KEKUATAN HUKUM BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNIVERSITAS IBA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Mario Dwika Anggara

NPM. 21.100.046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: Mario Dwika Anggara
NPM	: 21100046
PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
JUDUL	:KEKUATAN HUKUM DOKUMEELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Palembang, 9 Januari 2026

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Erniwati, S.H.,M.Hum	Aidil Fitri, S.Pd.i,M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mario Dwika Anggara

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 Juni 2002

NPM : 21100046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk menjadikan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 9 Januari 2026



Mario Dwika Anggara
(21100046)

ABSTRAK

Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi. Selain itu dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.Dalam perkembangannya, pada perjanjian *e-commerce* tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Permaslahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* . Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Kesimpulan dalam skripsi ini adapun bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* melalui penyelesaian non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi (gugatan perdata ke pengadilan) dengan mengacu pada KUHPerdata (Pasal 1243-1252) dan Pasal 38, dan Pasal 39 UU ITE, serta mengajukan aduan ke lembaga terkait seperti Kominfo atau OJK untuk pemulihan hak, ganti rugi, atau pemutusan kontrak.

Kata kunci : *Kekuatan hukum, dokumen elektrtonik, E-commerce*

ABSTRACT

The emergence of electronic evidence has at least reached technological advancements and developments. Furthermore, with the recognition of electronic transactions and electronic documents, e-commerce activities have a legal basis. As e-commerce contracts evolve, various unlawful acts, resulting in losses for other parties, remain unaffected. The problem in this thesis is the legal force of electronic documents in electronic e-commerce transactions, based on Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and the legal remedies that parties can pursue in the event of a breach of contract in an e-commerce transaction. The author uses normative juridical research, a method that focuses on library data or secondary data through legal principles and comparative law. The conclusion of this thesis is that the parties can pursue legal remedies in the event of a breach of contract in an e-commerce transaction through non-litigation (negotiation, mediation, arbitration) or litigation (civil lawsuits in court) based on the Civil Code (Articles 1243-1252) and Articles 38 and 39 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as filing complaints with relevant institutions such as the Ministry of Communication and Information Technology or the Financial Services Authority (OJK) for restoration of rights, compensation, or contract termination.

Keywords: Legal force, electronic documents, e-commerce